PERSEPSI

SELASA, 25 AGUSTUS TAHUN 2020

Covid-19: Dampak dan Agenda Pemulihan Ekonomi

Oleh
Muh. Amier Arham**

CORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020, sebelumnya pihak pemerintah berkeyakinan Covid-19 ini tidak akan masuk ke Indonesia dengan aneka ragam argumentasi yang melawan logika sains. Jika negara lain berusaha "menutup diri" dengan interaksi negara --penghasil-- virus, di Indonesia malahan sebaliknya pemerintah meluncurkankan kebijakan untuk membuka diri. Nyatanya Covid-19 penyebarannya meningkat tajam secara eksponensial, alhasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DKI Jakarta) terkesan berebut panggung mengatasi Covid-19. Virus ini pada akhirnya menyebarkeseluruh wilayah dan dunia maka ia menjadi pandemi.

Selama kurang lebih lima bulan, beberapa wilayah kurva penyebaran Covid-19 belum melandai bahkan trennya naik. Kondisi serupa yang terjadi di Gorontalo, kendati provinsi ini paling terakhir terpapar Covid-19. Sebagai wabah bersifat pandemi, untuk mencegah, memberantas dan menyembuhkan pasien yang terpapar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai. Sehingga pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah "dipaksa" melakukan refocusing anggaran, menggeser beberapa pembiayaan kegiatan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan refocusing anggaran membawa dampak bagi daerah, sebab untuk menggerakkan perekonomian peranan APBD sangat besar. Cukup banyak program yang tertunda atau bahkan dihapus karena anggarannya digeser, dengan sendirinya kegiatan pembangunan (belanja modal), belanja barang dan jasa terhenti mengakibatkan perputaran ekonomi tersendat.

Sejalan dengan itu untuk mengurangi tingkat

kali Pemerintah Provinsi menerapkan PSBB. Adanya kebijakan PSBB masyarakat dibatasi pergerakannya, bekerja dari rumah (Work from Home). Namun beberapa jenis pekerjaan sangat tidak efektif dilakukan dari rumah, seperti buruh harian, pedagang kecil serta UMKM non kebutuhan dasar. Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, bahkan ada yang kehilangan pendapatan sama sekali sehingga ekonomi mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Quartal Pertama (Q1) tahun 2020 hanya tumbuh 4,06 persen, melambat dibandingkan dengan periode Q1 di tahun 2019 sebesar 6.75 persen. Walaupun faktanya penurunan pertumbuhan ekonomi Gorontalo terjadi bukan pada saat pandemi Covid-19 saja, lima tahun belakangan pun telah mengalami perlambatan. Secara nasional hampir seluruh sektor melemah, kecuali Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Informasi dan Komunikasi. Di Gorontalo sektor-sektor yang masih dapat survive, diantaranya Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Pendidikan. Sementara sektor yang terpuruk adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (-0,55 %), Sektor Jasa Perusahaan (-0,04 %) dan Sektor Jasa Lainnya (-3,06 %). Sektor Pertanian sendiri di Gorontalo masih dapat tumbuh dibanding dengan tingkat nasional, tetapi nilainya tidak sebesar ketiga sektor yang disebutkan di atas. Permintaan produk pertanian sifatnya inelastis, sekalipun harganya menurun permintaannya tidak akan meningkat dan sebaliknya bila terjadi penurunan harga maka perubahan permintaan tidak besar.

Sektor Pertanian sekalipun tidak tumbuh signifikan, namun tetap menjadi penunjang

makanan (produk pertanian) dibanding dengan mengkonsumsi non makanan. Apalagi pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial dampaknya terhadap sektor pertanian kecil karena pusat produksi berada di wilayah bukan padat penduduk, interaksi para petani tidak terlalu rentan terpapar virus corona. Apalagi iklim cukup mendukung kegiatan sektor pertanian terutama untuk tanaman padi, pangkal soalnya adalah supply tersendat karena terkendala pada alat transportasi yang dibatasi pergerakannya.

Memasuki Q2 tahun 2020 sudah dapat dipastikan bahwa ekonomi akan mengalami kontraksi, menurut proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi di Q2 mengalami kontraksi sekitar -0,4 persen, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Q2 lebih optimis yakni sebesar 0,4 persen. Sementara pertumbuhan secara Year on Year (Y on Y) di tahun 2020 menurut lembaga-lembaga internasional memprediksi mengalami kontraksi, misalnya IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh -0,3 persen, Bank Dunia (0,0 %), OECD (-3,9 - - 2,8 %), ADB (-1,0 %) dan Bloomberg (0,5 %).

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi akan berdampak begitu luas, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, masyarakat miskin meningkat. Simulasi pertumbuhan ekonomi 1 (satu) persen akan menyerap tenaga kerja

angka kemiskinan akan bertambah 3,02 juta orang dan angka pengangguran bertambah sebesar 4,03 juta. Untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 15,31 persen angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan Maret 2020 menurun tipis yakni sebesar 15,22. Namun angka tersebut belum memperhitungkan dimasa pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Gorontalo Bulan April 2020. Mengingat pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia pada bulan maret dan Bulan April 2020 di Gorontalo berarti dampaknya akan mulai terlihat pada Q2 tahun 2020. Artinya, sebelum pandemi Covid-19 angka kemiskinan sulit diturunkan, apalagi setelahnya justru akan meningkat. Melihat karakteristik, dampak Covid-19 lebih terasa di wilayah perkotaan maka dalam hal ini angka kemiskinan perkotaan justru akan menyumbang kenaikan angka kemiskinan secara umum dibanding kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kata data bekerjasama dengan Kementerian Kominfo (2020), ada tiga sektor usaha perusahaan yang mengalami pemburukan kondisi, yakni berasal dari sektor ekosistem pendukung digitalisasi, maritim dan pariwisata. Hasil analisis SDGs Center UNPAD juga menemukan hal serupa salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sebelum terjadi penyebaran Covid-19 sudah banyak perusahaan mengalami pemburukan, maka perusahaan yang kondisinya sudah buruk makin sulit bangkit. Namun ada juga sebagian kecil perusahaan yang semula dalam keadaan biasa saja, justru membaik saat pandemi. Perusahaanstartup di sektor sistem pembayaran, logistik, pertanian dan kesehatan justru membaik.

Pandemi Covid-19

gain karena harga-harga produk pertanian melonjak tajam. Berbeda halnya dengan sektor-sektor olahan mengalami keterpurukan, karena itu pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi di sektor pertanian. Tidak hanya sekedar meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mendorong sektor pertanian lebih produktif dengan mengintegrasikan sektor-sektor lainnya, agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak restriksi sosial di daerah.

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak (mungkin) lagi dilakukan maka kehidupan dengan adaptasi baru sudah menjadi keharusan untuk menjalankan roda ekonomi. Adaptasi baru berupa Less Contact Economy (LCE) mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka, berubah menjadi konektivitas tingkat tinggi berupa kontak manusia melalui teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam bertransaksi sudah menjadi maenstrem (kebutuhan) oleh karena itu teknologi digital sudah harus diterapkan untuk mendorong tumbuhnya UMKM.

Sektor usaha kemaritiman dan pariwisata juga paling berdampak terhadap Covid-19, sektor-sektor ini mampu menyerap tenaga kerja. Kendati pada dasarnya kedua sektor tersebut belum menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Akan tetapi sektor tersebut merupakan potensi sumber daya lokal yang perlu dioptimalkan, bukan hanya bergantung terhadap sektor pertanian. Sektor kemaritimian dan pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, adanya Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah daerah mendesain kembali arah kebijakan sektor maritim

Oleh
Muh. Amier Arham**

CORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020, sebelumnya pihak pemerintah berkeyakinan Covid-19 ini tidak akan masuk ke Indonesia dengan aneka ragam argumentasi yang melawan logika sains. Jika negara lain berusaha "menutup diri" dengan interaksi negara --penghasil-- virus, di Indonesia malahan sebaliknya pemerintah meluncurkankan kebijakan untuk membuka diri. Nyatanya Covid-19 penyebarannya meningkat tajam secara eksponensial, alhasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DKI Jakarta) terkesan berebut panggung mengatasi Covid-19. Virus ini pada akhirnya menyebarkeseluruh wilayah dan dunia maka ia menjadi pandemi.

Selama kurang lebih lima bulan, beberapa wilayah kurva penyebaran Covid-19 belum melandai bahkan trennya naik. Kondisi serupa yang terjadi di Gorontalo, kendati provinsi ini paling terakhir terpapar Covid-19. Sebagai wabah bersifat pandemi, untuk mencegah, memberantas dan menyembuhkan pasien yang terpapar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai. Sehingga pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah "dipaksa" melakukan refocusing anggaran, menggeser beberapa pembiayaan kegiatan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pelaksanaan refocusing anggaran membawa dampak bagi daerah, sebab untuk menggerakkan perekonomian peranan APBD sangat besar. Cukup banyak program yang tertunda atau bahkan dihapus karena anggarannya digeser, dengan sendirinya kegiatan pembangunan (belanja modal), belanja barang dan jasa terhenti mengakibatkan perputaran ekonomi tersendat.

Sejalan dengan itu untuk mengurangi tingkat penyebaran, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini terbilang efektif di beberapa daerah, untuk Gorontalo sendiri 3 (tiga) kali Pemerintah Provinsi menerapkan PSBB. Adanya kebijakan PSBB masyarakat dibatasi pergerakannya, bekerja dari rumah (Work from Home). Namun beberapa jenis pekerjaan sangat tidak efektif dilakukan dari rumah, seperti buruh harian, pedagang kecil serta UMKM non kebutuhan dasar. Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, bahkan ada yang kehilangan pendapatan sama sekali sehingga ekonomi mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Quartal Pertama (Q1) tahun 2020 hanya tumbuh 4,06 persen, melambat dibandingkan dengan periode Q1 di tahun 2019 sebesar 6.75 persen. Walaupun faktanya penurunan pertumbuhan ekonomi Gorontalo terjadi bukan pada saat pandemi Covid-19 saja, lima tahun belakangan pun telah mengalami perlambatan. Secara nasional hampir seluruh sektor melemah, kecuali Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Informasi dan Komunikasi. Di Gorontalo sektor-sektor yang masih dapat survive, diantaranya Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Pendidikan. Sementara sektor yang terpuruk adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (-0,55 %), Sektor Jasa Perusahaan (-0,04 %) dan Sektor Jasa Lainnya (-3,06 %). Sektor Pertanian sendiri di Gorontalo masih dapat tumbuh dibanding dengan tingkat nasional, tetapi nilainya tidak sebesar ketiga sektor yang disebutkan di atas. Permintaan produk pertanian sifatnya inelastis, sekalipun harganya menurun permintaannya tidak akan meningkat dan sebaliknya bila terjadi penurunan harga maka perubahan permintaan tidak besar.

Sektor Pertanian sekalipun tidak tumbuh signifikan, namun tetap menjadi penunjang ekonomi Gorontalo, maka ini menjadi peluang untuk terus dikembangkan di Gorontalo. Pada masa krisis rumah tangga lebih cenderung mempertimbangkan pengadaan (konsumsi) makanan (produk pertanian) dibanding dengan mengkonsumsi non makanan. Apalagi pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial dampaknya terhadap sektor pertanian kecil karena pusat produksi berada di wilayah bukan padat penduduk, interaksi para petani tidak terlalu rentan terpapar virus corona. Apalagi iklim cukup mendukung kegiatan sektor pertanian terutama untuk tanaman padi, pangkal soalnya adalah supply tersendat karena terkendala pada alat transportasi yang dibatasi pergerakannya.

Memasuki Q2 tahun 2020 sudah dapat dipastikan bahwa ekonomi akan mengalami kontraksi, menurut proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi di Q2 mengalami kontraksi sekitar -0,4 persen, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Q2 lebih optimis yakni sebesar 0,4 persen. Sementara pertumbuhan secara Year on Year (Y on Y) di tahun 2020 menurut lembaga-lembaga internasional memprediksi mengalami kontraksi, misalnya IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh -0,3 persen, Bank Dunia (0,0 %), OECD (-3,9 - - 2,8 %), ADB (-1,0 %) dan Bloomberg (0,5 %).

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi akan berdampak begitu luas, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, masyarakat miskin meningkat. Simulasi pertumbuhan ekonomi 1 (satu) persen akan menyerap tenaga kerja sekitar 400,000 pekerja dan sebalikya bila terjadi penurunan 1 (satu) persen mengakibatkan terjadinya pengangguran sebesar itu pula. Berdasarkan skenario berat diperkirakan oleh pemerintah angka kemiskinan akan bertambah 3,02 juta orang dan angka pengangguran bertambah sebesar 4,03 juta. Untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 15,31 persen angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan Maret 2020 menurun tipis yakni sebesar 15,22. Namun angka tersebut belum memperhitungkan dimasa pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Gorontalo Bulan April 2020. Mengingat pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia pada bulan maret dan Bulan April 2020 di Gorontalo berarti dampaknya akan mulai terlihat pada Q2 tahun 2020. Artinya, sebelum pandemi Covid-19 angka kemiskinan sulit diturunkan, apalagi setelahnya justru akan meningkat. Melihat karakteristik, dampak Covid-19 lebih terasa di wilayah perkotaan maka dalam hal ini angka kemiskinan perkotaan justru akan menyumbang kenaikan angka kemiskinan secara umum dibanding kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kata data bekerjasama dengan Kementerian Kominfo (2020), ada tiga sektor usaha perusahaan yang mengalami pemburukan kondisi, yakni berasal dari sektor ekosistem pendukung digitalisasi, maritim dan pariwisata. Hasil analisis SDGs Center UNPAD juga menemukan hal serupa salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sebelum terjadi penyebaran Covid-19 sudah banyak perusahaan mengalami pemburukan, maka perusahaan yang kondisinya sudah buruk makin sulit bangkit. Namun ada juga sebagian kecil perusahaan yang semula dalam keadaan biasa saja, justru membaik saat pandemi. Perusahaanstartup di sektor sistem pembayaran, logistik, pertanian dan kesehatan justru membaik.

Pandemi Covid-19 membuka jendela untuk melihat dengan jelas sektor mana yang survive di tengah krisis, bahkan sejarah membutikan tatkala terjadi krisis tahun 1997/1998 produk pertanian (petani) paling banyak mendapatkan gain karena harga-harga produk pertanian melonjak tajam. Berbeda halnya dengan sektor-sektor olahan mengalami keterpurukan, karena itu pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi di sektor pertanian. Tidak hanya sekedar meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mendorong sektor pertanian lebih produktif dengan mengintegrasikan sektor-sektor lainnya, agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak restriksi sosial di daerah.

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak (mungkin) lagi dilakukan maka kehidupan dengan adaptasi baru sudah menjadi keharusan untuk menjalankan roda ekonomi. Adaptasi baru berupa Less Contact Economy (LCE) mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka, berubah menjadi konektivitas tingkat tinggi berupa kontak manusia melalui teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam bertransaksi sudah menjadi maenstrem (kebutuhan) oleh karena itu teknologi digital sudah harus diterapkan untuk mendorong tumbuhnya UMKM.

Sektor usaha kemaritiman dan pariwisata juga paling berdampak terhadap Covid-19, sektor-sektor ini mampu menyerap tenaga kerja. Kendati pada dasarnya kedua sektor tersebut belum menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Akan tetapi sektor tersebut merupakan potensi sumber daya lokal yang perlu dioptimalkan, bukan hanya bergantung terhadap sektor pertanian. Sektor kemaritimian dan pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, adanya Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah daerah mendesain kembali arah kebijakan sektor maritim dan pariwisata dengan melibatkan pelaku usaha, civil society dan perguruan tinggi. (*)

Penulis adalah Pengajar dan Dekan Fakultas Ekonomi UNG